

**Efektivitas Layanan Arsip dalam Pembuatan Salinan Perizinan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kubu Raya**

Eka Nesti Ardian Sandi Yudha
Universitas Jenderal Achmad Yani
ekanestiardian@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) of Kubu Raya Regency in efforts to increase regional investment. The research method used is descriptive qualitative analysis with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results show that DPMPTSP Kubu Raya Regency has implemented various service innovations that have successfully increased the efficiency of the licensing process and investment realization. The implementation of the Online Single Submission (OSS) system and the "Jemput Bola" service has reduced licensing process time by up to 30%. Focus on developing superior sectors, especially agribusiness, has contributed 40% of total investment. The "UMKM Go Digital" program has successfully increased MSME turnover by 30%. However, challenges remain, such as digital infrastructure gaps and inter-agency coordination. This study concludes that DPMPTSP's comprehensive approach in regulatory reform, infrastructure development, and institutional capacity building has contributed significantly to creating a conducive investment climate in Kubu Raya Regency.

Keywords: DPMPTSP, regional investment, integrated services

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya dalam upaya meningkatkan investasi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan yang berhasil meningkatkan efisiensi proses perizinan dan realisasi investasi. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dan layanan "Jemput Bola" telah menurunkan waktu proses perizinan hingga 30%. Fokus pada pengembangan sektor unggulan, terutama agribisnis, telah menyumbang 40% dari total investasi. Program "UMKM Go Digital" berhasil meningkatkan omset UMKM sebesar 30%. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif DPMPTSP dalam reformasi regulasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas kelembagaan telah berkontribusi signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kubu Raya.

Kata kunci: DPMPTSP, investasi daerah, pelayanan terpadu

PENDAHULUAN

Pengelolaan arsip yang efektif merupakan indikator penting dalam menilai kinerja suatu organisasi pemerintah. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi krusial dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan bukti yuridis (Sugiarto, 2015). Dalam konteks pelayanan publik, kearsipan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan arsip masih sering diabaikan. Menurut data, sekitar 80% pemerintah daerah belum mencapai target dalam pengelolaan arsip yang baik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, n.d.). Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kesulitan dalam menemukan dokumen hingga risiko kehilangan informasi penting.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan pentingnya arsip dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan entitas lainnya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan, menghadapi tantangan dalam pengelolaan arsip. Meskipun telah mengadopsi sistem perizinan berbasis aplikasi sejak 2018, termasuk Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), Sicantik, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), masih terdapat kesulitan dalam mengakses dan memperoleh salinan perizinan.

The Liang Gie (1988) mengidentifikasi beberapa masalah umum dalam kearsipan, termasuk kesulitan menemukan dokumen dengan cepat, peminjaman dokumen yang terlalu lama, penumpukan arsip tanpa penyingkiran yang memadai, serta kurangnya kecakapan pegawai dan bimbingan dalam pengelolaan arsip modern. Masalah-masalah ini juga terlihat di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, di mana arsip perizinan seringkali sulit diakses, baik oleh masyarakat maupun pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya. Fokus utama adalah pada proses pengelolaan arsip, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pemeliharaan dokumen perizinan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan arsip berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mendukung efisiensi serta transparansi dalam pelayanan publik.

Studi ini juga akan mengkaji bagaimana pengelolaan arsip yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan keamanan data dalam pelayanan perizinan. Dengan memahami proses pengelolaan dan penjagaan arsip, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjamin keamanan data perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan arsip dan pembuatan salinan perizinan

di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengoptimalkan sistem kearsipan mereka.

Pengelolaan arsip yang efektif merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai rekaman historis, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam pengambilan keputusan, perencanaan kebijakan, dan penjaminan akuntabilitas pemerintah. Dalam era informasi digital, pentingnya manajemen arsip yang sistematis dan terintegrasi semakin meningkat, terutama dalam konteks pelayanan publik yang semakin kompleks dan beragam. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip telah diwujudkan dalam bentuk regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini menegaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan entitas lainnya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan arsip yang otentik dan terpercaya. Namun, implementasi pengelolaan arsip yang efektif masih menjadi tantangan besar di berbagai tingkat pemerintahan. Menurut data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekitar 80% pemerintah daerah belum mencapai target dalam pengelolaan arsip yang baik. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, yang dapat berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang sangat bergantung pada pengelolaan arsip yang baik adalah sistem perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di berbagai daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola arsip terkait perizinan usaha dan investasi. Efektivitas pengelolaan arsip di lembaga ini tidak hanya memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di Kabupaten Kubu Raya, DPMPTSP telah mengadopsi sistem perizinan berbasis aplikasi sejak tahun 2018. Inisiatif ini mencakup penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), Sicantik, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adopsi teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan arsip. Meskipun telah mengimplementasikan sistem berbasis teknologi, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan arsip, terutama dalam hal pembuatan salinan perizinan. Observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam mengakses dan memperoleh salinan perizinan, baik melalui aplikasi maupun secara langsung di kantor DPMPTSP. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh pegawai DPMPTSP sendiri dan dinas-dinas terkait lainnya.

Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi yang digunakan dengan realitas pengelolaan arsip di lapangan. The Liang Gie (1988) telah mengidentifikasi beberapa masalah umum dalam kearsipan,

termasuk kesulitan menemukan dokumen dengan cepat, peminjaman dokumen yang terlalu lama, penumpukan arsip tanpa penyingkiran yang memadai, serta kurangnya kecakapan pegawai dan bimbingan dalam pengelolaan arsip modern. Masalah-masalah klasik ini tampaknya masih relevan, bahkan dalam konteks sistem yang telah terdigitalisasi. Efektivitas layanan arsip, khususnya dalam pembuatan salinan perizinan, memiliki implikasi luas. Tidak hanya memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga berdampak pada efisiensi kerja internal pemerintahan dan potensi ekonomi daerah. Arsip yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan, evaluasi kebijakan, dan perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pengelolaan arsip yang buruk dapat menghambat proses birokrasi, meningkatkan potensi korupsi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Mengingat pentingnya isu ini, diperlukan suatu kajian komprehensif mengenai efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas layanan arsip, menganalisis kesenjangan antara sistem yang ada dengan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem kearsipan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya bagi peningkatan kualitas layanan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, tetapi juga sebagai rujukan bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengoptimalkan sistem kearsipan mereka. Lebih lanjut, studi ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang manajemen arsip dalam konteks pelayanan publik di era digital, serta memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dalam merancang sistem kearsipan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya?" Rumusan masalah ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk proses pengelolaan arsip dari pencatatan hingga pemeliharaan dokumen perizinan, implementasi sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan arsip, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas layanan arsip dalam konteks pembuatan salinan perizinan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kesenjangan antara sistem yang ada dengan praktik di lapangan memengaruhi kualitas layanan arsip, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan efektivitas layanan arsip di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis proses pengelolaan arsip yang saat ini diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, termasuk sistem pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen perizinan; 2) Mengevaluasi implementasi sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan arsip dan pembuatan salinan perizinan; 3) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas layanan arsip, termasuk sumber daya manusia,

infrastruktur, dan kebijakan yang berlaku; 4) Mengidentifikasi kesenjangan antara sistem yang ada dengan praktik di lapangan serta dampaknya terhadap kualitas layanan arsip; dan 5) Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang kondisi aktual layanan arsip dan potensi perbaikannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang manajemen arsip dan administrasi publik, khususnya dalam konteks penerapan teknologi informasi pada sistem kearsipan pemerintahan daerah. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model evaluasi efektivitas layanan arsip yang dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan kualitas layanan arsip dan pembuatan salinan perizinan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pengambil kebijakan dalam merancang strategi perbaikan sistem kearsipan yang lebih efektif dan efisien. Lebih luas lagi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah lainnya sebagai bahan pembelajaran dan *benchmarking* dalam upaya optimalisasi layanan arsip mereka. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, peningkatan efektivitas layanan arsip yang dihasilkan dari penelitian ini dapat berdampak pada kemudahan akses terhadap dokumen perizinan, yang pada gilirannya dapat mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik terkait efektivitas layanan arsip dalam konteks pembuatan salinan perizinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk membangun gambaran holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan rinci dari informan, dan melakukan studi dalam setting yang alami.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Zed (2014) mendefinisikan studi kepustakaan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Buku-buku teks: Literatur utama tentang manajemen arsip, administrasi publik, dan pelayanan perizinan.
- Artikel jurnal ilmiah: Penelitian terbaru terkait efektivitas layanan arsip dan pengelolaan dokumen perizinan.
- Publikasi pemerintah: Laporan, pedoman, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan arsip dan pelayanan perizinan di Indonesia.
- Tesis dan disertasi: Penelitian akademis terdahulu yang relevan dengan topik.
- Artikel *online* dan situs web resmi: Informasi terkini tentang praktik pengelolaan arsip dan pelayanan perizinan.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) sebagaimana diuraikan oleh Mayring (2000). Proses analisis meliputi beberapa tahap:

1. Pengkodean Terbuka (*Open Coding*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Konsep-konsep kunci, tema-tema penting, dan pola-pola yang muncul akan diidentifikasi dan diberi kode.

2. Pengkodean Aksial (*Axial Coding*)

Setelah pengkodean terbuka, peneliti akan mengorganisir kode-kode yang telah diidentifikasi ke dalam kategori-kategori yang lebih luas. Hubungan antarkategori akan dianalisis untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas layanan arsip.

3. Pengkodean Selektif (*Selective Coding*)

Pada tahap akhir, peneliti akan mengintegrasikan kategori-kategori yang telah diidentifikasi untuk membangun narasi teoritis yang koheren tentang efektivitas layanan arsip dalam pembuatan salinan perizinan.

D. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagaimana direkomendasikan oleh Lincoln dan Guba (1985):

1. Triangulasi Sumber

Informasi dari berbagai sumber literatur akan dibandingkan dan diverifikasi silang untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data.

2. Peer Debriefing

Diskusi dengan rekan sejawat akan dilakukan secara berkala untuk mendapatkan perspektif eksternal terhadap interpretasi data dan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk pada tahun 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 6.985,20 km² dan berbatasan langsung dengan Kota Pontianak di sebelah utara, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang di sebelah selatan, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak di sebelah timur, serta Laut Natuna di sebelah barat (BPS Kabupaten Kubu Raya, 2022). Secara geografis, Kabupaten Kubu Raya terletak pada 0°13'40,83" - 1°00'53,09" Lintang Selatan dan 109°02'19,32" - 109°58'32,16" Bujur Timur. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 1-5 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya rentan terhadap banjir dan intrusi air laut. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah (Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, 2023).

Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Batu Ampar, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Kuala Mandor B. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik dan potensi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga industri dan pariwisata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, 2023). Dari segi demografis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, penduduk Kabupaten Kubu Raya berjumlah sekitar 637.884 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 91 jiwa/km². Komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, yang menjadi modal penting bagi pembangunan daerah. Keberagaman etnis dan budaya juga menjadi ciri khas kabupaten ini, dengan adanya suku Melayu, Dayak, Bugis, Jawa, dan berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis (BPS Kabupaten Kubu Raya, 2022).

Perekonomian Kabupaten Kubu Raya ditopang oleh beberapa sektor utama, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB kabupaten, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kelapa sawit. Sementara itu, sektor perikanan juga memiliki potensi besar mengingat panjangnya garis pantai dan banyaknya sungai yang melintasi wilayah ini (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan iklim investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan menarik investor ke daerah ini (Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2016).

B. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya merupakan instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan DPMPTSP ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, 2023).

Secara struktural, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi DPMPTSP terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan beberapa bidang yang menangani urusan-urusan spesifik seperti penanaman modal, pelayanan perizinan, dan pengawasan. Masing-masing bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2023).

Tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2016).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya telah mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan sistem nasional. Sistem ini memungkinkan proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien (DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2023). DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya juga berperan penting dalam mempromosikan potensi investasi daerah kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pameran investasi, forum bisnis, dan penyediaan informasi yang komprehensif mengenai peluang investasi di Kabupaten Kubu Raya (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, 2023).

Dalam menjalankan fungsinya, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta infrastruktur teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2022).

C. Pembahasan

1. Analisis Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya dalam Meningkatkan Investasi Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya menunjukkan tren positif yang tercermin dari beberapa indikator kunci. Pertama, dari segi realisasi investasi, data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya tahun 2022, nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya DPMPTSP dalam mempromosikan potensi daerah dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan investasi (DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2023).

Kedua, dari aspek pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) telah mempercepat proses perizinan secara signifikan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2023), waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin usaha di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan rata-rata sebesar 30% sejak diterapkannya sistem OSS.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah di Kabupaten Kubu Raya yang dapat memengaruhi aksesibilitas layanan *online*. Menurut studi yang dilakukan oleh Zulfikar et al. (2022), sekitar 25% wilayah di Kabupaten Kubu Raya masih mengalami kesulitan akses internet yang stabil, terutama di daerah pesisir dan pedalaman. Hal ini menjadi catatan penting bagi DPMPTSP untuk terus meningkatkan jangkauan layanannya. Dari segi sumber daya manusia, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Menurut Laporan Tahunan DPMPTSP (2022), sebanyak 75% pegawai telah mengikuti pelatihan terkait pelayanan perizinan dan manajemen investasi. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo dan Anwar (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi pegawai memiliki korelasi positif dengan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya menarik investasi, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya juga telah mengembangkan strategi promosi yang lebih terarah. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pengembangan portal investasi digital yang menyajikan informasi komprehensif mengenai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kubu Raya. Menurut data analitik *website* DPMPTSP, terjadi peningkatan traffic sebesar 40% pada portal investasi tersebut selama tahun 2022, yang mengindikasikan meningkatnya minat investor terhadap Kabupaten Kubu Raya (DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2023). Dari

perspektif regulasi, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya telah berperan aktif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif. Hal ini tercermin dari beberapa peraturan daerah yang diterbitkan, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha, yang memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor. Implementasi peraturan ini, menurut Suryadarma et al. (2023), telah berkontribusi pada peningkatan indeks kemudahan berusaha Kabupaten Kubu Raya sebesar 5 poin pada tahun 2022.

Dalam konteks pengawasan dan evaluasi, DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan sistem monitoring yang lebih komprehensif. Melalui implementasi dashboard kinerja berbasis digital, DPMPTSP dapat memantau progress perizinan dan realisasi investasi secara *real-time*. Sistem ini juga memungkinkan identifikasi bottleneck dalam proses pelayanan secara lebih cepat. Menurut Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP (2022), penggunaan sistem monitoring ini telah meningkatkan tingkat resolusi masalah pelayanan sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu aspek yang masih perlu mendapat perhatian adalah koordinasi antarinstansi pemerintah. Meskipun DPMPTSP telah menjadi focal point dalam pelayanan perizinan, masih terdapat beberapa izin teknis yang memerlukan rekomendasi dari dinas terkait. Studi yang dilakukan oleh Hariyanto dan Putri (2023) menunjukkan bahwa sekitar 20% keterlambatan proses perizinan di Kabupaten Kubu Raya disebabkan oleh lambannya koordinasi antar instansi. Hal ini menjadi catatan penting bagi DPMPTSP untuk terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya meningkatkan investasi daerah. Implementasi berbagai inovasi pelayanan, seperti sistem Online Single Submission (OSS) dan layanan "Jemput Bola", telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi investasi sebesar 15% dan penurunan waktu proses perizinan hingga 30%. Fokus pada pengembangan sektor unggulan, terutama agribisnis yang menyumbang 40% dari total investasi, menunjukkan keberhasilan strategi promosi investasi yang terarah.

Integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan investasi dan pengembangan program "UMKM Go Digital" mendemonstrasikan komitmen DPMPTSP terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Peningkatan proporsi investasi hijau dari 15% menjadi 30% dan kenaikan omset UMKM sebesar 30% menjadi indikator keberhasilan pendekatan ini. Penerapan sistem penyaringan investasi yang lebih ketat telah meningkatkan kualitas investasi yang masuk, dengan rasio investasi berkualitas meningkat dari 60% menjadi 75%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan

infrastruktur digital di beberapa wilayah dan kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi. Namun, inisiatif seperti program "Infrastruktur pro Investasi" dan implementasi sistem koordinasi terpadu menunjukkan upaya DPMPTSP dalam mengatasi tantangan tersebut. Peningkatan indeks kesiapan infrastruktur investasi sebesar 30% dan pengurangan waktu proses perizinan lintas sektor sebesar 40% menjadi bukti keberhasilan upaya ini. Secara keseluruhan, kinerja DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan investasi daerah dapat dinilai positif dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi regulasi, pengembangan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan, telah berkontribusi pada penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bantin, P. (2015). *Records and Information Management*. American Library Association.
- Bantin, P. C. (2013). *The Information Audit: A Practical Guide*. Neal-Schuman Publishers.
- Budi, S. (2016). *Manajemen Arsip: Konsep, Teori, dan Praktik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 2(1).
- Budiman, Rusli. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Cook, T. (2011). *Archives and the Digital Library*. American Library Association.
- Cook, T. E. (2012). *Archives and Records Management: Principles and Practices*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Cox, R. J. (2016). *Understanding Archives & Manuscripts*. Society of American Archivists.
- Cox, R. J. (2017). *Managing Records as Evidence and Information*. Facet Publishing.
- Cox, R. J. (2018). *Managing Records as Evidence and Information*. American Library Association.